

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan di suatu negara merupakan suatu proses yang berlangsung secara berkelanjutan dan tidak memiliki tenggat waktu yang tetap. Demikian juga pembangunan yang terjadi di negara Indonesia. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih layak di masa depan. Secara umum, pembangunan merupakan suatu bentuk perubahan yang dirancang oleh pihak-pihak yang menginginkan terjadinya transformasi demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.¹ Seluruh pelaksanaan pembangunan itu bertujuan untuk memakmurkan kehidupan masyarakat. Pembangunan masyarakat dalam suatu negara demokrasi merupakan tujuan dari demokrasi itu sendiri yang mencita-citakan terbentuknya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dalam setiap sendi-sendi kehidupan.²

Indonesia merupakan negara berkembang yang tengah melaksanakan pembangunan secara luas. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diprioritaskan karena berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjadi aspek utama dalam pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah. Intensitas pembangunan infrastruktur yang tinggi menghadirkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah terjadi kemajuan pembangunan infrastruktur, seperti; pembangunan jalan, jembatan, bendungan dan perumahan. Namun, tanpa mengesampingkan dampak positif yang ada, dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk mengeksplorasi dan menyoroti dampak negatif yang ditimbulkan. Salah satu dampak negatif yang cukup besar mulai muncul manakala pemerintah tidak melihat kehidupan masyarakat sipil, terutama ketika pembangunan infrastruktur menindas hak asasi masyarakat sipil atau mengabaikan aspek kemanusiaan. Contohnya perampasan tanah milik masyarakat dan

¹ Soleman B. Taneko, *Struktur dan Proses Sosial, Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan* (Jakarta: CV Rajawali, 1984), hlm. 160.

² Mubyartyo, *Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Di Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), hlm. 8.

pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masyarakat, dan masalah korupsi. Di sini pemerintah melakukan segala upaya untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur dengan rela mengorbankan masyarakat sipil. Situasi ini berseberangan dengan konsep Gus Dur sebagaimana dikutip Yoseph Yapi Taum, bahwasannya di dalam politik harus ada rasa kemanusiaan, namun dalam konteks sekarang politik mengabaikan rasa kemanusiaan.³ Akibat berambisi pada pembangunan infrastruktur, pemerintah lupa akan orientasi pembangunan pada pembangunan manusia. Hal ini menyebabkan masyarakat mengalami situasi keterlemparan akibat pembangunan. Situasi keterlemparan yang dimaksud adalah hilangnya aspek kemanusiaan masyarakat, terjadinya pergeseran dari kondisi yang manusiawi beralih kepada situasi yang tidak manusiawi. Hal ini selaras dengan situasi keterlemparan yang digambarkan oleh Heidegger menurut tafsiran Yoseph Yapi Taum, bahwa baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, kita mengalami kondisi seolah-olah terjebak atau terlempar ke dalam suatu lingkungan yang belakangan disebut sebagai Indonesia. Kita hadir begitu saja di dunia ini, di dalam realitas Indonesia, seakan tanpa pilihan, dan hidup dalam ruang yang dipenuhi oleh rasa takut (*furcht*) dan kecemasan eksistensial (*angst*) yang nyata.⁴

Perkembangan reformasi politik di Indonesia pasca tahun 1999 terus mengalami perubahan. Khususnya pada masa reformasi, terjadi pergeseran mendasar dalam wacana ideologi dan arah pembangunan politik nasional. Perubahan ini terlihat dalam dua aspek utama:⁵ *Pertama*, paradigma pembangunan yang sebelumnya bersifat sentralistik mulai bergeser menuju sistem yang lebih desentralistik. *Kedua*, aspek ideologi dan politik dalam pembangunan menunjukan pola yang beragam (*divergen*). Kondisi ini berkaitan dengan pembatasan masa jabatan presiden yang dibatasi lima (5) tahun untuk satu periode dan maksimal sepuluh (10) tahun untuk dua periode. Oleh sebab itu, arah kebijakan politik

³ *Ibid.*

⁴ Yoseph Yapi Taum, "Manusia Indonesia dan Keterpenjaraannya: Meretorik Ulang Indonesia", *Seminar Lustrum IV* (Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 29 Mei 2013), hlm.5.

⁵ Lestanta Budiman dan Hastangka Hastangka, "Nawacita, Pancasila, dan Ideologi Politik Pembangunan Nasional", *Jurnal Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan*, 8:2 (Yogyakarta: September 2020), hlm. 149.

pembangunan sangat ditentukan oleh keputusan presiden dan wakil presiden yang terpilih.

Salah satu presiden yang terpilih pada era reformasi adalah Joko Widodo. Ia menjabat sebagai presiden selama dua periode, yaitu pada tahun 2014–2019 dan 2019–2024. Pada periode pertama, Joko Widodo didampingi oleh Jusuf Kalla sebagai wakil presiden, sementara pada periode kedua ia berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Dengan demikian, masa kepemimpinan Joko Widodo berlangsung selama sepuluh (10) tahun. Berdasarkan hal tersebut, penulis memilih untuk mengkaji politik pembangunan infrastruktur pada masa kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (2014–2019).

Joko Widodo bersama Jusuf Kalla mengusung *nawacita* sebagai visi dan misi dalam pembangunan Indonesia. Dalam konteks pembangunan, *nawacita* hadir sebagai ideologi politik yang menarik, terutama karena pada era reformasi arah dan orientasi pembangunan belum sepenuhnya mapan dan masih dalam proses pencarian bentuk.⁶ Kekuatan *nawacita* ini tidak terlepas dari gagasan Joko Widodo yang merumuskan pembangunan berlandas pada ideologi Pancasila. Konsep *nawacita* yang diusung oleh presiden Jokowi sebenarnya merupakan hasil pengembangan dari pola pikir Ir. Soekarno dalam merancang arah pembangunan bangsa. Gagasan utama Ir. Soekarno dikenal dengan istilah *Trisakti*. Menurut H.D. Haryo Sasongko, *Trisakti* merupakan tiga prinsip fundamental perjuangan yang dirancang untuk memastikan bangsa Indonesia tetap merdeka dari segala bentuk dominasi dan kasih sayang bangsa lain, serta mampu mewujudkan sosialisme khas Indonesia tanpa harus berpihak pada kekuatan besar dunia, baik blok Timur yang sosialis maupun blok Barat yang kapitalis. Tiga prinsip *Trisakti* tersebut mencakup: kedaulatan di sektor politik, kemandirian dalam sektor ekonomi, serta jati diri yang kokoh dalam bidang kebudayaan.⁷ Pandangan Bung Karno ini bertujuan untuk membentuk negara Indonesia yang memiliki sistem politik yang positif, negara

⁶ *Ibid.*

⁷ H.D. Haryo Sasongko, *Bung Karno, Nasionalisme dan demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Grafiksi, 2005), hlm. iv.

yang mandiri yang tidak selalu bergantung pada negara lain dan masyarakat memiliki kepribadian yang lahir dari budaya dan hidup dalam budaya.

Gagasan politik Bung Karno tentunya masih kontekstual dalam menjawab persoalan negara Indonesia yang terus berada dalam kekacauan kehidupan berpolitik, memiliki utang yang tinggi terhadap negara lain dan krisis karakter masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Yuwono yang menyatakan bahwa politik berperan sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah, bukan sebagai tujuan akhir, dengan fokus pada pelaksanaan program-program kesejahteraan serta pengakuan terhadap bentuk-bentuk tertentu dari partisipasi massa.⁸ Artinya politik itu harus digunakan untuk tujuan kebaikan bersama (*bonum commune*) bukan untuk kebutuhan parsial atau sebagian orang.

Nawacita merupakan sebuah ideologi. Sebagai ideologi yang diusung oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla, nawacita pada hakikatnya memiliki visi dan misi yang sejalan dengan konsep Trisakti yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno, yakni: kedaulatan di bidang politik, kemandirian dalam ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan. Namun, Joko Widodo merumuskan gagasan tersebut ke dalam sembilan (9) agenda utama, yaitu:⁹ 1) Mengembalikan peran negara dalam melindungi seluruh rakyat dan menjamin rasa aman bagi setiap warga negara. 2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan dapat dipercaya melalui pengembangan sistem pemerintahan yang responsif dan partisipatif. 3) Mendorong pemerataan pembangunan dari daerah pinggiran melalui penguatan peran daerah dan desa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4) Melaksanakan reformasi terhadap sistem hukum serta penegakan hukum yang bebas dari praktik korupsi, menjunjung martabat, dan dapat dipercaya demi membangun negara yang kuat. 5) Mengembangkan kemandirian ekonomi melalui penguatan dan pemberdayaan sektor-sektor strategis dalam perekonomian nasional. 6) Meningkatkan kemampuan produksi masyarakat dan memperkokoh

⁸ Yuwono Sudarsono, *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik Sebuah Bangsa* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991), hlm. 18-19.

⁹ Mochdar Soeleman dan Mohamad Noer, "Nawacita Sebagai Strategi Khusus Jokowi Periode Oktober 2014-20 Oktober 2015", *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, 13:1 (Universitas Nasional, 2017), hlm. 4.

posisi daya saing bangsa di tingkat global. 7) Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan demi tujuan mengembangkan dan meningkatkan kualitas manusia. 8) Mewujudkan revolusi karakter bangsa dengan mereformasi kurikulum pendidikan nasional secara menyeluruh. 9) Memperkuat kebhinekaan dan restorasi sosial Indonesia. Kesembilan poin nawacita ini memiliki isi yang berkualitas dan berpihak pada rakyat.

Arah kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah telah ditentukan secara resmi melalui peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 menetapkan visi dan misi pembangunan nasional yang berfokus pada terwujudnya Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Kemandirian dimaknai; kemampuan bangsa untuk berdiri sejajar dengan negara lain melalui kekuatan dan potensi yang dimiliki sendiri. Kemajuan merujuk pada tercapainya tingkat kesejahteraan yang tinggi, yang ditopang oleh sistem politik dan hukum yang stabil serta efektif. Keadilan berarti tidak adanya perlakuan diskriminatif terhadap siapa pun, baik antarindividu, antarjenis kelamin, maupun antara daerah. Sementara itu, kemakmuran menggambarkan keadaan di mana semua kebutuhan dasar masyarakat tercapai, sehingga Indonesia dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi komunitas global.¹⁰ Jabaran undang-undang No. 17 tahun 2007 menjadi pedoman atau referensi bagi pemerintah dalam menggapai tujuan pembangunan. Hal yang sama berlaku pada nawacita, sebagai ideologi pembangunan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Nawacita sebagai ideologi pembangunan Joko Widodo, hemat penulis adalah sebuah revolusi strategi politik yang sangat positif dalam membangun Indonesia, terutama Joko Widodo dan Jusuf Kalla melakukan pembangunan fisik dan nonfisik secara bersamaan. Misalnya, pembangunan kepribadian masyarakat lewat revolusi karakter. Wujud revolusi karakter diungkapkan lewat kampanye revolusi mental dan pembangunan dari pinggiran (dari desa) menjadi wujud pemikiran yang menjawab konteks permasalahan masyarakat. Penulis menilai

¹⁰ M. Murdiyana, “Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia”, *Jurnal Politik Pemerintah*, 18: 2 (2017), hlm. 73.

Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebenarnya sedang berada pada jalan pembangunan yang benar. Namun peralihan fokus pada pembangunan fisik (infrastruktur) demi pertumbuhan dan kemajuan ekonomi dengan tanpa mempertimbangkan rasa kemanusiaan pada diri masyarakat telah membuat kinerja pembangunan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengalami kemunduran. Pada masa kepemimpinan pertamanya, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama yang dilakukan secara merata hingga ke pelosok negeri, dengan tujuan mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang ini dibandingkan negara-negara lain.¹¹ Selain fokus pada pembangunan, Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga meluncurkan berbagai program bantuan sosial, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Program Keluarga Harapan (PKH).¹² Selain itu, Joko Widodo dan Jusuf Kalla melakukan kerja sama dengan negara lain (mengundang investor asing dan investor lokal untuk membantu kelancaran pembangunan di Indonesia). Atas kerja sama dengan investor asing dan investor lokal maka progres pembangunan fisik era Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengalami kemajuan yang sangat tinggi dalam bidang infrastruktur. Peningkatan pembangunan infrastruktur, tidak terlepas dari kerja sama antara Indonesia dan China. China menjadi investor terbesar mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Catatan Kementerian Luar Negeri Indonesia, terdapat 36 nota kesepahaman (MoU) baru antara Indonesia dan Tiongkok yang tercapai pada era pemerintahan Jokowi sebagai bagian dari hubungan kerja sama kedua negara.¹³ Kerja sama dalam pembangunan infrastruktur dilakukan melalui mega-infrastruktur China-Obor (*One Belt One Road*). Melalui agenda OBOR, Tiongkok berupaya menghidupkan kembali Jalur Sutra, yaitu jalur perdagangan yang menghubungkan Asia dan Eropa, melalui proyek pembangunan *Silk Road Economic Belt* untuk jalur darat, serta *21 Century Maritime Silk Road* untuk jalur laut. Proyek besar ini akan dibiayai oleh *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB), sebuah bank infrastruktur yang dipimpin oleh China.¹⁴ Indonesia

¹¹ Cornelia Evelin Cabui, "Refleksi Kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi Selama Tiga Tahun Pada Periode Kedua Pemerintahan", *Jurnal Adhikari*, 1:04 (April 2022), hlm. 221.

¹² *Ibid.*

¹³ Muhammad Tri Andika, Allya Nur Aisyah, "Analisis Politik Luar Negeri Indonesia-Cina di Era Presiden Joko Widodo: Benturan Kepemimpinan Ekonomi dan Kedaulatan", *Indonesian perspective*, 2:2 (Universitas Bakrie: Juli-Desember 2017), hlm. 165.

¹⁴ *Ibid.*

sendiri termasuk dalam sutra maritim yang mendapat bantuan pembangunan dari China. Bhawasannya BRI dianggap sebagai sarana yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai proyek pembangunan, karena di bawah kepemimpinan Jokowi, fokus utama lebih diarahkan pada pembangunan infrastruktur, baik di sektor transportasi darat maupun laut, serta program-program pembangunan lainnya.¹⁵ Atas dasar kerja sama ini, kemajuan infrastruktur di Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, Indonesia mencatat kemajuan signifikan dalam pembangunan infrastruktur. Menurut laporan dari IMD World Competitiveness Center, peringkat daya saing Indonesia naik dari posisi 43 pada tahun 2018 menjadi peringkat 32 pada tahun 2019. Peningkatan ini didasarkan pada sejumlah indikator, termasuk kondisi ekonomi, efisiensi bisnis, kualitas birokrasi, serta perkembangan infrastruktur.¹⁶

Dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur, pada tahun 2014 Presiden Joko Widodo membentuk Komite Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPPIP). Komite ini merupakan satuan tugas khusus yang diberi mandat untuk mengoordinasikan kebijakan antar pemangku kepentingan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014. Untuk mendanai pembangunan infrastruktur, selain menarik investasi dari dalam dan luar negeri, Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla mengalokasikan dana yang signifikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran infrastruktur mengalami peningkatan sebesar 52%, mencapai 415 triliun rupiah. Selama lima tahun masa pemerintahan Jokowi, rata-rata alokasi anggaran infrastruktur mencapai 346 triliun rupiah, dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 32,78 triliun rupiah atau sekitar 12,41% setiap tahunnya.¹⁷

Banyaknya pembangunan infrastruktur yang dibuat Joko Widodo dan Jusuf Kalla, memungkinkan Indonesia bersaing dengan negara lain dalam pembangunan

¹⁵ Sindy Yulia Putri dan Dairatul Ma'arif, "Kerjasama Ekonomi-Politik Indonesia dan Cina Pada Implementasi Program Belt dan Road Initiative", *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 9:7 (Lemhannas RI: 2019), hlm. 53.

¹⁶ Deva Eky Wijaya, *Kemajuan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Era Kepemimpinan Jokowi* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Juni 2021), hlm.7.

¹⁷ Divia Angelina dan Krismanti Tri Wahyuni, "Pengaruh Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2015-2019", *Seminar Nasional Official Statistics* (Jakarta Timur: Politeknik Statistika STIS, 2021), hlm. 734.

infrastruktur. Akan tetapi percepatan dan kemajuan pembangunan infrastruktur, telah mengorbankan masyarakat sipil. Pemerintahan Joko Widodo gencar melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Namun, dalam proses pembebasan lahan, terdapat sejumlah kasus yang menunjukkan adanya dugaan kriminalisasi terhadap masyarakat sipil yang terdampak penggusuran rumah dan tanah.¹⁸ Situasi ini semakin diperumit dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang dinilai oleh sebagian kalangan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi di ruang digital. Revisi UU ITE pada tahun 2016 yang membelenggu kebebasan pers dalam berekspresi.¹⁹ Kritik atas kebijakan politik pembangunan Joko Widodo dibatasi, penyebaran informasi tentang kinerja politik pembangunan Joko Widodo tidak transparan kepada masyarakat. Hal ini menjadi semakin buruk ketika gejolak masa pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menciptakan polemik yang paling besar yakni usaha Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan oleh politik Joko Widodo pada tahun 2019 dengan revisi undang-undang KPK.²⁰ Akibatnya tugas KPK dalam memberantas kasus korupsi semakin melemah.

Pembangunan infrastruktur dengan merampas tanah masyarakat sipil telah menjadi polemik yang sangat besar bagi masyarakat. Masyarakat kehilangan tanah, sebab dirampas oleh negara dengan mengatasnamakan politik pembangunan infrastruktur. Pendekatan pembangunan yang menitikberatkan pada paradigma *infrastructure first* secara masif pada akhirnya menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat, dan tidak jarang berujung pada munculnya konflik sosial.²¹ Ketegangan politik antara pemerintah dan masyarakat kerap muncul dalam proses pembebasan lahan. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur yang terus digalakkan belum mampu mengatasi persoalan-persoalan laten seperti inefisiensi, salah kelola, dan praktik korupsi.²² Pasalnya Joko Widodo dan Jusuf Kalla lebih mengutamakan kepentingan investor asing dan investor lokal dari pada masyarakat.

¹⁸ Irmaline Pakazeni dan Cindy Nabila, "Analisis Sistem Pemerintahan Di Indonesia Pada Demokrasi Di Era SBY Dan Jokowi", *The Journalist: Social And Government*, 1:3 (September 2020), hlm. 7.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm. 36.

²² *Ibid.*, hlm. 33.

Hal ini mengingatkan kita pada pertentangan politik pembangunan era presiden Soeharto. Pertentangan ini terjadi akibat masalah strategi pembangunan masa orde baru yang tidak menyentuh rakyat banyak dan mengecilkan peran pemerintah dengan mengutamakan peran modal asing, sehingga banyak merugikan rakyat Indonesia.²³

Skala prioritas Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang lebih memihak investor asing dan investor lokal telah meruntuhkan kepedulian Joko Widodo dan Jusuf Kalla terhadap Hak Asasi (HAM) masyarakat. Pembangunan infrastruktur dilakukan secara paksa dengan menuntut rakyat untuk menyerahkan tanah. Hal ini menambah laju pertumbuhan masalah pertanahan yang semakin rumit, terutama dengan adanya konflik agraria. Masyarakat dan pemerintah berperang untuk merebut tanah. Padahal, pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya negara atau pemerintah berstatus sebagai keamanan yang berfungsi untuk menjaga kemakmuran rakyat, bukan negara merampas tanah untuk kepentingan investor asing dan investor lokal dengan mengorbankan rakyat. Hal ini diperburuk dengan diresmikannya *omnibus law* yang mempersulit masyarakat dalam mempertahankan hak atas tanah mereka. Kekhawatiran tentang meningkatnya konflik pertanahan menjadi semakin sulit dihindari setelah disahkannya *omnibus law*, meskipun undang-undang tersebut menghadapi penolakan tegas di pengadilan dari kelompok lingkungan, serikat pekerja, dan organisasi masyarakat adat.²⁴ *Omnibus law* sejatinya sudah dibicarakan oleh Joko Widodo pada tahun 2019. Hemat penulis, *omnibus law* sebagai strategi politik Joko Widodo dalam mempermudah dan mempercepat pembangunan infrastruktur. *Omnibus Law* itu berisi undang-undang yang memperlemahkan perlindungan terhadap lingkungan. Contohnya; undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dengan tujuan mempermudah proses perizinan diberbagai sektor usaha di Indonesia termasuk infrastruktur. Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja dalam hal ini mengabaikan persyaratan

²³ Yunani Hasan, "Situasi Politik dan Ekonomi pada Masa Awal Pemerintahan Orde Baru", *Jurnal Forum Sosial*, 7:1 (Universitas Sriwijaya: Februari 2014), hlm. 477.

²⁴ Alvin Nicola, *Penilaian Risiko Korupsi Infrastruktur Di Indonesia* (Transparency international Indonesia, 2023), hlm. 37

persetujuan masyarakat serta mengesampingkan aspek ekologi, sosial, dan budaya, yang pada akhirnya secara langsung melanggar hak-hak masyarakat adat.²⁵ Sehingga para investor asing juga investor lokal dipermudah berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur.

Bereferensi pada kinerja pembangunan infrastruktur Joko Widodo dan Jusuf Kalla di atas, penulis menilai pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan telah menindas masyarakat, terutama ketika mengabaikan aspek kemanusiaan. Hal ini berseberangan dengan konsep pembangunan menurut ensiklik *Populorum Progressio*. Dalam artikel 14 ensiklik *Populorum Progressio* menekankan bahwa ekonomi tidak boleh dipisahkan dari realitas kemanusiaan dan perkembangan peradaban yang menjadi konteks keberlangsungannya. Hal yang paling utama adalah manusia itu sendiri-baik sebagai individu, sebagai bagian dari kelompok sosial, maupun sebagai seluruh umat manusia.²⁶

Manusia atau masyarakat harus menjadi subjek pembangunan bukan objek pembangunan infrastruktur. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur harus juga diberi ruang, sebab suara rakyat memiliki nilai dalam memutuskan pelaksanaan sebuah pembangunan infrastruktur. Tujuannya agar pembangunan itu tidak hanya menguntungkan dan memuaskan pemerintah dan investor asing dan lokal, tetapi keuntungan dan kepuasan masyarakat juga. Sebab tujuan yang lebih mulia menurut pandangan ensiklik *Populorum Progressio* nomor 21 adalah untuk mengubah status masyarakat dari status yang tidak manusiawi menuju status yang manusiawi.

Adapun, Kehidupan yang tidak manusiawi ditandai oleh berbagai bentuk kemiskinan, baik secara materiil, di mana seseorang tidak memiliki kebutuhan dasar untuk hidup, maupun secara moral, ketika individu terjebak dalam egoisme yang menindas. Ketidakmanusiawian juga tampak dalam struktur politik yang menindas, akibat meremehkan hak milik, pelaksanaan kekuasaan yang semena-mena, eksploitasi terhadap tenaga kerja, serta praktik ekonomi yang tidak adil.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Paus Paulus VI, *Populorum Progressio Perkembangan Bangsa-Bangsa*, penerj. Hardawirjaya (Jakarta:Departemen Dokumentasi dan Penerangan konferensi Waligereja Indonesia, 2021), hlm.14.

Sebaliknya, kehidupan yang layak bagi manusia ditandai dengan adanya kemiskinan, terpenuhinya kebutuhan dasar, terlepasnya individu dari hambatan sosial, terbukanya akses terhadap pengetahuan, serta tercapainya pengembangan diri dan kemajuan kebudayaan.²⁷

Pencapaian kondisi pembangunan yang layak manusiawi terpenuhi jika pembangunan itu juga bersifat manusiawi. Praktik penindasan terhadap masyarakat yang mengatasnamakan pembangunan harus dihindari. Pembangunan infrastruktur itu bersifat mengabdikan kepada masyarakat bukan masyarakat mengabdikan pada pembangunan infrastruktur. Sebab itu, diperlukan prinsip-prinsip dalam investasi pembangunan, antara negara kaya dan negara berkembang, antara investor asing dan investor lokal dengan masyarakat.

Adapun relasi antara investor asing dan investor lokal dengan pemerintah harus berdasar pada prinsip-prinsip sebagaimana diungkapkan dalam ensiklik *Populorum Progressio* nomor 44. Tanggung jawab pertama-tama terletak pada negara-negara kaya, yang memiliki kewajiban yang berasal dari nilai-nilai kemanusiaan dan hakikat alamiah manusia. Kewajiban ini mencakup beberapa hal penting. *Pertama*, mereka harus ungkapkan solidaritas melalui bantuan yang saling menguntungkan kepada negara-negara yang sedang berkembang. *Kedua*, mereka juga harus mendorong terciptanya keadilan sosial dengan memperbaiki ketimpangan dalam hubungan dagang antara negara yang kuat dan yang lemah. *Ketiga*, mereka diharapkan untuk menyebarkan kasih sayang universal, berusaha membangun persatuan global yang bersifat manusiawi, di mana setiap orang dapat saling berbagi dan menerima tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Langkah-langkah ini sangat mendesak, karena masa depan peradaban dunia sangat bergantung pada upaya ini.²⁸

Hemat penulis kajian terhadap politik pembangunan infrastruktur era Joko Widodo dan Jusuf Kalla (2014-2019) ditinjau secara teologis dari ensiklik *Populorum Progressio* menjadi suatu kajian teologis yang menarik. Secara teologis

²⁷ *Ibid.*, hlm. 18.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 34.

Paus Paulus VI dalam ensiklik *Populorum Progressio* menekankan pembangunan berpihak pada manusia, ekonomi yang melayani manusia. Sebab setiap manusia diciptakan menurut citra Allah (Kej.1:26-27), sehingga hemat penulis sejauh pembangunan berkontribusi atau melayani masyarakat manusia juga menunjukkan bentuk pelayanan kepada Allah.

Penulisan tesis ini diharapkan berkontribusi bagi pemerintah dan masyarakat, secara khusus dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan politik pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ada beberapa hal yang menarik yang dapat dicermati dari penulisan tesis ini: *pertama*, tesis ini berbicara tentang politik pembangunan infrastruktur era Joko Widodo dan Jusuf Kalla (2014-2019). Dari program pembangunan infrastruktur yang sudah terlaksana, penulis melihat jika pembangunan infrastruktur kehilangan unsur kemanusiaan. *Kedua*, penulis mengemukakan pentingnya meninjau program pembangunan infrastruktur Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam konsep pembangunan menurut ensiklik *Populorum Progressio*. *Ketiga*, tesis ini merupakan bentuk kepedulian penulis terhadap kinerja pembangunan infrastruktur Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dan secara khusus kepada masyarakat yang menjadi korban dari pembangunan infrastruktur. Maka dari itu, penulis memberi judul atas tulisan tesis ini: **POLITIK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ERA JOKO WIDODO DAN JUSUF KALLA (2014-2019): TINJAUAN TEOLOGIS DARI PERSPEKTIF ENSIKLIK POPULORUM PROGRESSIO.**

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Masalah kunci yang ingin ditelusuri oleh penulis dalam tesis ini, adalah: Bagaimana politik pembangunan infrastruktur era Joko Widodo dan Jusuf Kalla (2014-2019) ditinjau secara teologis dari sudut pandang ensiklik *Populorum Progressio*? Masalah-masalah turunan yang digunakan sebagai acuan untuk pokok permasalahan tersebut antara lain:

1. Bagaimana gambaran kinerja politik pembangunan infrastruktur era Joko Widodo dan Jusuf Kalla (2014-2019)?

2. Apa yang dimaksudkan dengan pembangunan menurut kajian ensiklik *Populorum Progressio*?
3. Bagaimana menilai politik pembangunan infrastruktur era Joko Widodo dan Jusuf Kalla (2014-2019) menurut kajian teologis ensiklik *Populorum Progressio*?

1.3 TUJUAN PENULISAN

Ada dua tujuan dari karya tulis ini:

1.3.1 Tujuan Umum

Tesis ini dibuat untuk membuat penilaian terhadap politik pembangunan infrastruktur Joko Widodo dan Jusuf Kalla secara teologis dari perspektif ensiklik *Populorum Progressio*. Tujuan ini dirincikan dalam tiga (3) tujuan berikut:

1. Memahami ciri khas politik pembangunan infrastruktur, dan permasalahan-permasalahan dalam sistem politik pembangunan infrastruktur Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
2. Mengenal dan memahami konsep pembangunan dalam ensiklik *Populorum Progressio*.
3. Memahami tinjauan teologis ensiklik *Populorum Progressio* terhadap politik pembangunan infrastruktur Joko Widodo dan Jusuf Kalla (2014-2019).

1.3.2 Tujuan Khusus

Tesis ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi pasca sarjana Teologi Kontekstual di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero.

1.4 MANFAAT PENULISAN

Karya tulis ini diharapkan berguna untuk mengevaluasi kinerja politik pembangunan infrastruktur era Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam kajian teologis dari perspektif ensiklik *Populorum Progressio*. Di samping itu, tujuan lain adalah agar menambah wawasan pengetahuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Manfaat itu dapat dirincikan;

Pertama, karya tulis ini membantu masyarakat dalam berefleksi dan mengkritisi kebijakan politik pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Kedua, karya tulis ini dapat mendorong masyarakat dan pemerintah untuk mempertimbangkan strategi pelaksanaan pembangunan infrastruktur juga dalam program perencanaan pembangunan infrastruktur jangka panjang.

Ketiga, karya tulis ini dapat mendorong mahasiswa dan mahasiswi IFTK Ledalero selalu mengkritisi kebijakan politik pembangunan pemerintah dan menjadi bahan referensi bagi mahasiswa dan mahasiswi dalam melanjutkan pengembangan kajian terhadap ensiklik *Populorum Progressio* dan politik pembangunan infrastruktur di Indonesia.

1.5 HIPOTESIS DASAR

Berdasarkan permasalahan pokok yang telah diuraikan, penulis mengajukan hipotesis bahwa terdapat kekeliruan dalam kinerja politik pembangunan infrastruktur pada era Joko Widodo dan Jusuf Kalla (2014-2019) yang perlu diperbaiki secara teologis berdasarkan ajaran dalam ensiklik *Populorum Progressio*, karena pembangunan tersebut mengabaikan dimensi kemanusiaan.

1.6 METODE PENULISAN

Dalam penulisan tesis ini, metode yang digunakan metode penelitian kepustakaan. Penulis membaca buku dan literatur-literatur yang membahas tentang kinerja politik pembangunan infrastruktur Joko Widodo dan Jusuf Kalla (2014-

2019) dan literatur ensiklik *Populorum Progressio*. Juga berbagai literatur lain sebagai bahan perbandingan untuk memperkuat argumentasi penulisan tesis ini.

1.7 SKOPE DAN BATASAN PENULISAN

Kinerja program politik pembangunan infrastruktur pada era Joko Widodo dan Jusuf Kalla (2014-2019) merupakan salah satu inisiatif besar yang digagas oleh Joko Widodo. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program unggulan dalam masa kepemimpinan mereka. Oleh karena itu, mendatangkan banyak investor asing dan lokal untuk investasi pada pembangunan infrastruktur menjadi strategi jitu yang ditetapkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Alhasil demi merealisasikan pembangunan infrastruktur ini, maka masyarakat dikorbankan.

Tema utama yang akan dibahas adalah identifikasi politik pembangunan infrastruktur pada era Joko Widodo dan Jusuf Kalla (2014-2019). Oleh karena itu, batasan atau ruang lingkup identifikasi masalah akan fokus pada politik pembangunan infrastruktur selama periode kepemimpinan mereka. Selanjutnya, kajian mengenai politik pembangunan infrastruktur ini akan dianalisis secara teologis melalui perspektif ensiklik *Populorum Progressio*.

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN

Karya ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I berisi pendahuluan yang akan membahas latar belakang penulisan, pokok permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, hipotesis dasar, metode penulisan, ruang lingkup dan batasan penulisan, serta sistematika penulisan.

Pada Bab II, penulis akan membahas kebijakan politik pembangunan infrastruktur selama masa pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (2014-2019). Hal-hal penting yang dibahas pada bab ini berupa: latar belakang pembangunan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan Joko Widodo dan Jusuf Kalla; prioritas pembangunan infrastruktur era Joko Widodo dan Jusuf Kalla (2014-2019); sumber pendanaan, dampak intervensi politik lokal terhadap kinerja pembangunan infrastruktur era Joko Widodo dan Jusuf Kalla; dan masalah-masalah pembangunan infrastruktur era Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Bab III membahas konsep pembangunan menurut ensiklik *Populorum Progressio*. Pembahasan penulis pada bab III berfokus pada hal-hal penting seputar ensiklik *Populorum Progressio* seperti: sejarah terbentuknya ensiklik *Populorum Progressio*; apa itu ensiklik *Populorum Progressio*; unsur-unsur dan bagian penting dari ensiklik *Populorum Progressio*; serta politik pembangunan menurut ensiklik *Populorum Progressio*.

Pada bab IV, penulis menguraikan tentang kritik terhadap politik pembangunan era Joko Widodo dan Jusuf Kalla (2014-2019) ditinjau secara teologis dari ensiklik *Populorum Progressio*. Secara khusus penulis menjabarkannya dalam beberapa sub-sub bab; rangkuman terhadap kajian politik pembangunan era Joko Widodo (2014-2019) dan kajian pembangunan dalam terang ensiklik *Populorum Progressio*, kritik teologis berdasar pada ensiklik *Populorum Progressio*, terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur era Joko Widodo dan Jusuf Kalla (2014-2019), dan relevansi praktis konsep pembangunan berdasarkan tinjauan teologis ensiklik *Populorum Progressio* bagi program politik pembangunan di Indonesia.

Bab V sebagai penutup, merangkum kembali hal-hal penting dari bab-bab sebelumnya. Selain kesimpulan, pada bab V penulis juga menyertakan usul dan saran.